

Pati, 14 Januari 2023

No : 023/I/TDP/2023

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tayu Dutapersada Tahun 2022

Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth :

Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kyai Saleh No. 12-14

Semarang

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama surat ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "TAYU DUTAPERSADA".

Demikian yang dapat kami sampaikan, Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. BPR Tayu DutaPersada

  
Setyorini

Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan



  
Bambang Tri Setiawan  
Direktur Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR TAYU DUTAPERSADA  
TAHUN 2022**



**JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI  
TELEPON: (0295) 385778**



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency), Kewajaran (fairness). Serta penilaian Self Assesment yang terdiri dari 11 faktor penilaian yang harus dilengkapi oleh BPR sebagai penerapan tata kelola yang baik.

Manajemen PT. BPR Tayu Dutapersada menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) sudah saatnya untuk di laksanakan di lingkungan Bank mengingat kondisi covid 19 saat ini yang masih mewabah dan memberikan dampak perekonomian yang cukup besar di Indonesia, BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah untuk menerapkan Tata Kelola BPR menjadi lebih baik kedepannya sehingga dapat membantu kebutuhan masyarakat sekitar.



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Bambang Trisetiawan Soelijo H
	NIK	:	3374060905710001
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan Tanggung Jawab:			
1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
2. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank.			
3. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.			
4. Direktur Utama wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR			
5. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai			
6. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar			
7. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan adanya pemisahan dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional			
8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.			
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris			
10. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai			
11. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank			
2.	Nama	:	Setyorini
	NIK	:	3318105206830004
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
2. Mengusulkan kebijakan Kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan Oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku
5. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan terbaru tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan
7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank
9. Menyusun Pedoman kebijakan penerapan Manajemen Risiko
10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang Organisasi
11. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
12. Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai
13. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/ atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT
14. Memberikan persetujuan terhadap (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) LTKM

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank tahun 2022 telah dilakukan oleh anggota Direksi dengan cukup baik. Namun sepanjang tahun 2022 pencapaian kredit yang diberikan belum tercapai 100% dari RBB ditahun 2022, pencapaian kredit yang diberikan hanya mencapai 96,70% sehingga BPR harus mengupayakan dan mengejar kembali pencapaiannya ditahun 2023 agar RBB tahun 2023 dapat tercapai ditahun depan.
3. Dalam pelaksanaan dalam pengelolaan Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mendukung penerapan tata kelola yang Baik dengan wujud Laporan Tata Kelola di Tahun 2022 yang telah disampaikan kepada OJK pada bulan Januari 2023.  
Dengan menerapkan dan memperhatikan penilaian 5 (lima) pilar yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran serta penilaian self assesment yang terdiri dari 11 faktor penilaian.
4. Audit eksternal tahun buku 2022 telah dilakukan melalui Akuntan Publik Drs. Mardjito, Akt, CPA KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan no surat tanda terdaftar OJK STTD.KAP- 115/PM.22/2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
5. Memastikan penilaian Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik di PT. BPR Tayu Dutapersada yang menilai dari risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan & risiko likuiditas yang telah dilaporkan kepada OJK mengenai Laporan Profil Risiko Semester II Tahun 2022 yang akan dilaporkan pada bulan Januari 2023
6. Melakukan pengkinian data nasabah dalam penerapan APU PPT dan telah dilaporkan dalam



bentuk laporan realisasi pengkinian data APU PPT tahun 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 Januari 2023

7. Direksi telah menyusun Laporan Pelaksanaan & Pengawasan RBB Semester II Tahun 2022 yang akan dilaporkan pada bulan Januari 2023

8. Non Performance Loan tahun 2022 belum begitu baik sehingga Direksi harus melakukan strategi penyelesaian NPL ditahun 2023 melalui cara-cara yang lebih efektif serta melalui jalur litigasi.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Johannes Setiadharna
	NIK	:	3674010104710001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan Tanggung Jawab:			
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan mengenai perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan.			
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen			
3. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank harus melaksanakan GCG atau tata kelola. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.			
4. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :			
a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.			
b. Hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.			
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.			
2.	Nama	:	RY Kristian Hardianto
	NIK	:	3324122411590001
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



**Tugas dan Tanggung Jawab:**

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
2. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi
3. Melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi
4. Menyetujui Kebijakan Perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi
5. Komisaris mengawasi jalannya usaha yang dilakukan oleh Direksi
6. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
7. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR
9. Mengusulkan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dan di RUPS kan terkait penunjukkan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

**Rekomendasi Kepada Direksi :**

1. Memastikan Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank dengan baik dan tercapai diatas 95% dari RBB
2. Memastikan dalam pelaksanaan pengelolaan Bank mengutamakan prinsip kehati-hatian.
3. Penilaian atas efektifitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta memastikan PE Audit dan Direktur Utama telah menindaklanjuti hasil temuan audit internal atau eksternal
4. Memastikan penilaian Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik di PT. BPR Tayu Dutapersada yang menilai dari risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan & risiko likuiditas.
5. Melakukan pengkinian data nasabah dalam penerapan APU PPT
6. Memastikan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menerapkan budaya patuh
7. Meningkatkan pertumbuhan kredit untuk rencana kerja di tahun 2023 dikisaran 10%.

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Nihil

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)**

#### **a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi



Tugas dan Tanggung Jawab :
Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite
BPR tidak memiliki Komite Audit karena modal inti BPR < 50M. Untuk periode Desember 2022 modal inti PT. BPR Tayu Dutapersada sebesar Rp 15.331.756.446,20

### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	PT. BPR Tayu Dutapersada tidak memiliki Komite Audit karena modal inti BPR < 50M	

### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
NIHIL PT. BPR Tayu Dutapersada tidak memiliki Komite Audit karena modal inti < 50M			



## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bambang Trisetiawan Soelijo H	3374060905710001	Rp0,00	0%
2.	Setyorini	3318105206830004	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Tayu Dutapersada sepanjang tahun 2022				

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bambang Trisetiawan Soelijo H	3374060905710001	-	-	0%
2.	Setyorini	3318105206830004	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di BPR maupun di Perusahaan lain sepanjang tahun 2022					



### C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

#### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bambang Trisetiawan Soelijo H	3374060905710001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Setyorini	3318105206830004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak ada hubungan keuangan pada PT BPR Tayu Dutapersada sepanjang tahun 2022					

#### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bambang Trisetiawan Soelijo H	3374060905710001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Setyorini	3318105206830004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/ atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank					



## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Johannes Setiadharna	3674010104710001	Rp0,00	0%
2.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	Rp3.750.000.000,00	75%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan saham Komisaris an Bapak RY Kristian Hardianto di BPR Tayu Dutapersada pada tahun 2022 masih sama seperti tahun 2021 yaitu sebesar 75% dengan jumlah nominal Rp 3.750.000.000 sebagai pemegang saham pengendali (PSP) di PT. BPR Tayu Dutapersada, meskipun sebagai PSP dalam menjalankan tugasnya tetap bertindak profesional tidak melakukan intervensi kepada Direksi. Sedangkan untuk Komisaris utama tidak memiliki kepemilikan saham di PT BPR Tayu Dutapersada.				

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	600605	PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama	45%
2.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	601427	PT. BPR Sinar Garuda	35%
3.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	601387	PT BPR Dana Berkah Pusakatama	60%
4.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	-	PT. Sarana Rizki Pusakatama	27.5%
5.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	-	Bumi Sekartama	50%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris BPR Tayu Dutapersada an Bapak R.Y. Kristian Hardianto memiliki kepemilikan saham di BPR lain atau di Perusahaan lain yang menunjukkan bahwa Komisaris memiliki komitmen tinggi untuk membantu bank dalam menjalankan fungsinya sebagai Intermediasi dana yang dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit yang dapat membangun ekonomi kerakyatan khususnya di sektor UMKM. Sedangkan untuk Komisaris Utama an Bapak Johannes Setiadharna tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR lain atau perusahaan lain.					



## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Johannes Setiadharna	3674010104710001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
1. Dewan Komisaris Tidak ada hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR 2. Komisaris Bank berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank					

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Johannes Setiadharna	3674010104710001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris Utama Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/ atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Sedangkan salah satu anggota Komisaris Bank memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank					



## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp343.000.000,00	2	Rp180.600.000,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berdasarkan Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp108.108.000,00	2	Rp46.332.000,00
Total			Rp451.108.000,00		Rp226.932.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Gaji & Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris					

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tunjangan Transportasi (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan Telekomunikasi (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Untuk Fasilitas Anggota Direksi diberikan fasilitas transportasi penggantian uang sewa kendaraan berikut dengan bahan bakarnya sesuai dengan SK Direksi & RUPS. Untuk fasilitas telekomunikasi diberikan kepada Direksi berupa pulsa yang ditetapkan sesuai dengan SK Direksi. Dewan Komisaris tidak memiliki fasilitas yang telah disebutkan diatas.			



## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.81 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.87 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.07 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.69 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5.01 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji Tertinggi dan Gaji Terendah telah dihitung sesuai dengan ketentuan	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	19 Maret 2022	2	1. Pembahasan Kinerja & Pencapaian 2. Pembahasan Monitoring OS, NPL & User Kredit 3. Pembahasan Revisi RBB Oleh OJK 4. Pembahasan Manajemen Risiko & Sistem Informasi 5. Pembahasan Pengawasan Komisaris Terhadap APU PPT 6. Pembahasan Pelaporan yang Rekomendasi & Tanda Tangan Komisaris 7. Pembahasan Kenaikan Gaji Karyawan
2.	22 Juni 2022	2	1. Pembahasan Penyelesaian NPL 2. Pembahasan Pencapaian Kredit Yang Diberikan 3. Pembahasan Terkait Surat dari Lembaga Bantuan Hukum 4. Pembahasan Laporan Keuangan & Kinerja Bank 5. Pembahasan Serta Sosialisasi Pencegahan Anti Fraud 6. Pembahasan Asuransi Kredit Nasabah 7. Pelaporan yang Membutuhkan Rekomendasi & Tanda Tangan Komisaris
3.	23 September 2022	2	1. Pembahasan Penyelesaian NPL 2. Pembahasan Pencapaian Realisasi Dibanding



			RBB 3. Pembahasan Pemeriksaan Audit OJK 4. Pembahasan Pemantauan Kesehatan Bank 5. Pembahasan Realisasi Kredit Dibanding RBB 6. Pembahasan Bulan Oktober 2022 Bulan Inklusi (Promo Kredit) 7. Pelaporan yang Membutuhkan Rekomendasi & Tanda Tangan Komisaris
4.	14 Desember 2022	2	1. Pembahasan Pemantauan Perbaikan Hasil Pemeriksaan OJK 2. Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank 3. Pembahasan Manajemen Risiko (Risk Appetite & Tolerance) 4. Pembahasan Rancangan Rencana Bisnis PT. BPR Tayu Dutapersada 5. Pembahasan Restrukturisasi Dampak Covid 19 & Kredit Bermasalah (NPL) 6. Pembahasan Kewajiban Pemenuhan Laporan Yang Disampaikan di Bulan Nopember 2022 7. Pembahasan APU PPT
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
<p>Dalam penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sebanyak 4x pertemuan dalam 1 tahun dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk pencapaian atau target yang telah disusun oleh Direksi dalam RBB, semua pihak harus terlibat untuk mencapai target yang telah dibuat dengan cara seluruh unit/ jenjang organisasi PT. BPR Tayu Dutapersada harus mengupayakan salah satunya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembahasan Kinerja &amp; Pencapaian selama tahun 2022</li><li>2. Rapat Pembahasan Kinerja BPR (Strategi penurunan NPL yang lebih efektif mengingat dengan adanya pandemi dampak covid19 karena hampir semua diwilayah Kabupaten Pati banyak yang terkena covid19 dan masyarakat terkena dampaknya dari berbagai sektor usaha). Dan saat ini memang beberapa nasabah usahanya masih belum pulih secara normal namun Bank mengupayakan agar nasabah yang usahanya sudah pulih Bank akan mengarahkan agar lepas dari restrukturisasi covid 19 yaitu beralih pada POJK 33/POJK 03/2018..</li><li>3. Pembahasan terkait dengan adanya Pemeriksaan Audit OJK pada 6 September 2022 exit meeting 28 September 2022</li><li>4. Pembahasan mengenai compensation &amp; benefit karyawan sehingga menjadi lebih terukur melalui pendekatan kinerja</li><li>5. Fungsi Manajemen Risiko untuk mengantisipasi, analisa serta preventife dalam meminimalkan risiko sebelum terjadi.serta fungsi pengawasan APU PPT</li><li>6. Pelaporan-pelaporan rutin ke Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lainnya</li><li>7. Review hasil temuan audit intern, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan lainnya</li></ol>			



## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Johannes Setiadharna	3674010104710001	4	0	100%
2.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Mengingat jumlah anggota Dewan Komisaris ada 2 (dua) Orang, maka kehadiran dalam rapat yang telah dilaksanakan 4x dalam 1 tahun sepanjang tahun 2022 tersebut dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris dengan persentase tingkat kehadirannya 100%. Dan 1x kunjungan ke PT. BPR Tayu Dutapersada dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan Bank.					

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank berkenaan dengan penyimpangan internal yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun karyawan sepanjang tahun 2022 TIDAK ADA bentuk penyimpangan yang dilakukan.								



## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. BPR Tayu Dutapersada atau NIHIL.		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Selama Tahun 2022 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang menyebabkan PT. BPR Tayu Dutapersada mengalami kerugian yang signifikan, semua transaksi telah sesuai dengan ketentuan internal & semua transaksi operasional telah mendapatkan otorisasi dan dinilai wajar.									

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	10 Juni 2022	Sosial	Pemberian dana kegiatan sosial di daerah Desa Winong Kec Pati dalam rangka sedekah bumi atau bersih Desa yang diadakan dalam 1 tahun 1x kegiatan.	Sekretaris Desa Winong / Panitia	Rp750.000,00
2.	12 Juli 2022	Sosial	Sumbangan Sedekah Bumi Desa Semampir Kecamatan Pati Tahun 2022	Panitia Sedekah Bumi Desa Semampir	Rp500.000,00



**PT. BPR TAYU DUTAPERSADA**

**JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI**

Telepon: (0295) 385778

Website: tayudutapersada.site. Email: bprtayu@gmail.com

**Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Selama tahun 2022 PT. BPR Tayu Dutapersada memberikan dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan di 2 tempat yaitu di Desa Winong & Desa Semampir Kecamatan Pati. Hal ini bertujuan sebagai sarana branding PT. BPR Tayu Dutapersada agar masyarakat mengetahui bahwa BPR ikut partisipasi dalam kegiatan mereka dan mengajak masyarakat dapat memiliki fasilitas di BPR baik tabungan, deposito maupun kredit.

Pati, 14 Januari 2023

**PT. BPR TAYU DUTAPERSADA**

**Menyetujui,**

  
**Bambang Trisetiawan**  
Direktur Utama



  
**Johannes Setiadharma**  
Komisaris Utama



## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR TAYU DUTAPERSADA
Alamat	: JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI
Nomor Telepon	: (0295) 385778
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp15.331.756.446,00
Total Aset	: Rp52.332.269.497,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR TAYU DUTAPERSADA Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.96	0.392
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.40	0.360
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.35	0.235
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.28	0.228
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.50	0.038
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.02	0.202
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	2.17	0.163
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
<b>Nilai Komposit</b>			<b>2.200</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>



## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.96)**

Jumlah Direksi ada 2 sudah sesuai dengan ketentuan dengan BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 yaitu modal inti BPR per Desember 2022 Rp 15.331.756.446 harus ada 2 Direktur yang 1 Direktur sebagai Membawahi Fungsi Kepatuhan 1 sebagai Direktur Utama. Sesuai dengan Surat Pengangkatan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Nomor S-190/KR.0313/2020 (RUPS Tanggal 23 Maret 2020)

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.4)**

Sesuai dengan ketentuan OJK bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50M maka memiliki 2 Dewan Komisaris, dan PT. BPR Tayu Dutapersada memiliki modal inti dibawah 50M yaitu modal ini untuk periode Desember 2022 sebesar Rp 15.331.756.446 sehingga jumlah Dewan Komisaris di BPR ada 2 yaitu sebagai Dewan Komisaris Utama dan Dewan Komisaris. Untuk pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan Job Description & tata tertib kerja Dewan Komisaris

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

PT BPR Tayu Dutapersada memiliki modal inti dibawah 80M sehingga tidak memiliki Fungsi Komite Audit

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)**

Sepanjang tahun 2022 PT. BPR Tayu Dutapersada tidak menemukan benturan kepentingan dari pihak Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris maupun seluruh karyawan. Dan terdapat ketentuan maupun sanksi yang tegas apabila terdapat benturan kepentingan di BPR .

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.35)**

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Tayu Dutapersada mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan sejak bulan September 2020 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 014/IX/SK-DIR/2020 yang bertanggung jawab kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Job Discription Fungsi Kepatuhan

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.28)**

Sesuai dengan ketentuan OJK berkaitan dengan modal inti kurang dari 50M PT. BPR Tayu Dutapersada memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit dengan nomor SK.Dir 005/III/SK.Dir/2022 tanggal 10 Maret 2022 dengan melakukan fungsi audit sesuai dengan Pedoman kerja dan prosedur Audit Internal yang berlaku di BPR.

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.5)**

PT. BPR Tayu Dutapersada Telah menunjuk Akuntan Publik Drs. Mardjito, Akt, CPA dengan no surat tanda terdaftar OJK STTD.AP-109/ PB.122/2018. dengan KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan no surat tanda terdaftar OJK STTD.KAP-115/PM.22/2018



## **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.02)**

Dalam penerapan Manajemen Risiko telah disusun oleh PE Manajemen Risiko dengan melakukan analisis Manajemen Risiko dan didukung oleh sistem dalam proses pelaporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dilaporkan secara semesteran

## **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)**

Sudah disusun melalui PKPB PD- TDP-04 yang telah dikinikan pada tanggal 28-11-2022 & SOP-TDP-07 pada tanggal 1 Nop 2022. Dan sepanjang tahun 2022 PT. BPR Tayu Dutapersada tidak ada pelanggaran pelanggaran BMPK.

## **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.17)**

RBB tahun 2022 Sudah dilakukan dan dilaporkan ke OJK melalui website online OJK tanggal 14 Desember 2021 dan sesuai dengan evaluasi OJK maka RBB direvisi dan dilaporkan kembali ke OJK pada tanggal 7 Maret 2022

## **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)**

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan di PT BPR Tayu Dutapersada yang didukung sistem yaitu aplikasi PINtech sejak bulan Agustus 2019 dan telah mendapatkan rekomendasi dari OJK yang memberikan kemudahan dalam penyampaian data kepada OJK

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance – GCG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban untuk menerapkan prinsip Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (business process) PT BPR Tayu Dutapersada selama periode tahun 2022 penerapan tata kelola mendapat nilai komposit 2,2 yang menghasilkan penilaian tata kelola dengan baik, dimana PT BPR Tayu Dutapersada terus berproses dengan melalui pendekatan fungsi tata kelola atas pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR, pengendalian secara menyeluruh terhadap semua aktivitas bisnis & karyawan sehingga selama periode tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran / penyimpangan terkait dengan kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ekstern maupun intern Bank. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran / penyimpangan dimaksud tentu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance – GCG) periode tahun 2022 dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance – GCG) tahun pelaporan 2022 ini masih jauh dari harapan sesuai dengan ketentuan POJK dan SEOJK, tetapi kami tetap berupaya dan mendukung program OJK dalam mewujudkan BPR Tayu Dutapersada sebagai Perusahaan yang berkualitas bagi seluruh Stake Holder.



Pati, 14 Januari 2023

**PT. BPR TAYU DUTAPERSADA**

Menyetujui,

  
**Bambang Trisetiawan**  
Direktur Utama



  
**Johannes Setiadharna**  
Komisaris Utama



## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT. BPR TAYU DUTAPERSADA Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR TAYU DUTAPERSADA selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pati, 14 Januari 2023

PT. BPR TAYU DUTAPERSADA

  
**Bambang Trisetiawan**  
Direktur Utama



  
**Johannes Setiadharna**  
Komisaris Utama

Pati, 14 Januari 2023

No : 024/I/TDP/2023

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tayu Dutapersada Tahun 2022

Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth :

Ketua DPP PERBARINDO

KOMP. PATRA II NO. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, RT.15/RW.3,

Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, DKI Jakarta,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama surat ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "TAYU DUTAPERSADA" untuk dapat disampaikan melalui media PERBARINDO.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. BPR Tayu DutaPersada



Setyorini

Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan



  
Bambang Tri Setiawan  
Direktur Utama

**P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT TAYU DUTAPERSADA**

**Kantor Pusat :**

Jl. Pangeran Diponegoro No. 57, Pati  
Teln. (0295) 385778. E-mail : bortavu@gmail.com



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPAHAN



# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT BPR Tayu Dutapersada

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505623-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600585-16012023082931

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bprtayu@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-16 08:29:31



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.